BUPATI NAGAN RAYA
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrsi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 4179);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003);

5. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOmor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah di ubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Pardayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama:

17. Peraturan Menteri Negara Pardayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penepatan Kinerja dan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

20. Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

21. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya;

23. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagan Raya;

24. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya;

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Nagan Raya;

27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya;

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya;

29. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG *PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA* PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012 – 2017**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati Nagan Raya beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya di singkat IKU adalah Ukuran Keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan Ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiantan sebagai Penjabaran dari Tugas Pokok dan fungsi Organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai Acuan Ukuran Kinerja yang digunakan oleh Pemerintahan Kabupaten meliputi:
   a. Rencana Jangka Menengah/Rencana Strategis
   b. Rencana Kirnerja Tahunan/ Rencana Kerja
   c. Penetapan Kinerja
   d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
   e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
   f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

(2) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertujuan:
   a. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik;
   b. Untuk memperoleh Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 3

Idikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
Pada tanggal: 28.... Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal: 29. Januari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR..87

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR :..5...TAHUN 2016
TANGGAL : 28 JANUARI 2016 M
...RABIUL AHKIR 1437 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2012 s/d 2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**			
	1.1 Pertumbuhan PDRB	%	4.56	7,0-7,5
	1.2 Laju inflasi Kab. Nagan Raya	%	3,43	4,2
	1.3 PDRB per kapita	Juta	7.08	7.65
	1.4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	79.51	86.71
	1.5 Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	184	190
B	**Fokus Kesejahteraan Sosial**			
1.	**Pendidikan**			
	1.1. Angka melek huruf	%	93.00	95.00
	1.2. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.9	12
	1.3. Angka partisipasi kasar			
	SD/MI/Paket A	%	124.08	145.13
	SMP/MTS/Paket B	%	96.94	99.25
	SM/MA/Paket C	%	86.16	92.67
	1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan			
	SD Sederajat	%	31.75	36.75
	SLTP Sederajat	%	23.95	24.00
	SLTA Sederajat	%	18.53	24.52
	Diploma I/II/III	%	5.15	6.75
	Diploma IV/SI	%	4.80	5.30
	S2/S3	%	0.2	1.2
	SLTP+	%	52.63	61.77
	1.5 Angka partisipasi murni			
	1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89.07	93.02
	1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70.07	75.92
	1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	62.03	70.6
2.	**Kesehatan**			
	2.1 **Angka usia harapan hidup**	Tahun	69.87	71.96
	2.2 **Persentase balita gizi buruk**	%	0.9	0.4
3.	**Pertanahan**			
	3.1 Persentase penduduk yang memiliki lahan			
4.	**Ketenagakerjaan**			
	4.1 Rasio penduduk yang bekerja	%	0.986	0.991
C	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**			
1	**Kebudayaan**			
	1.1 Jumlah gedung	Unit	0.06	0.10
2	**Pemuda dan Olahraga**			
	2.1 Jumlah klub olahraga	Klub	14	14
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
A	**Fokus Pelayanan Urusan Wajib**			
1.	**Pendidikan**			
	1.1. Pendidikan dasar			
	1.1.1. Angka partisipasi sekolah	%	88.28	93.28
	1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	77.51	80.06
	1.1.3. Rasio guru terhadap murid	%	102.3	135.14
	1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	1.7	2.35

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.2 Pendidikan menengah			
	1.2.1 Angka partisipasi sekolah	%	86.15	100.01
	1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	3.28	4.68
	1.2.3 Rasio guru terhadap murid	%	842.18	956.81
	1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	%	3.77	4.42
	1.3 Fasilitas Pendidikan			
	1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	654	904
	1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	407	507
	1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):			
	1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	12.98	
	1.5 Angka Putus Sekolah			
	1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	2	2
	1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0
	1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	15	6
	1.6 Angka Kelulusan			
	1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.45	99.7
	1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.35	99.6
	1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.48	99.73
	1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99.53	99.78
	1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100
	1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	58.30	68.30
2.	**Kesehatan**			
	2.1 Rasio posyandu per satuan balita	/ 1000 balita	13.51	18.85
	2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/100.000 pddk	0.75	1.45
	2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/100.000 pddk	6.85	8.10
	2.4 Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000 pddk	0.34	2.04
	2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/100.000 pddk	3.01	8.01
	2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	30	80
	2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82.30	100.00
	2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	49	95
	2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
	2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100
	2.11 Cakupan puskesmas	unit	1.3	3.4
	2.12 Cakupan pembantu puskesmas	unit	0.19	3.69
	2.13 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	80	95
	2.14 Cakupan Kunjugan Ibu Hamil dengan komplikasi Bidan yang ditangani	%	30	80
	2.15 Cakupan Pelayanan Nifas	%	89	90
	2.16 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	13	80
	2.17 Cakupan Kunjungan Bayi	%	72	90
	2.18 Cakupan Pelayanan Balita	%	54	90
	2.19 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan KLG Miskin	%	50	95
	2.20 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	15	95
	2.21 Cakupan Peserta KB Aktif	%	33	70
	2.22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100
	2.23 cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100
	2.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100
	2.25 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan	%	100	100
	2.26 Cakupan Desa Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100
	2.27 Cakupan Desa Siaga Aktif	%	35	75
3	**Pekerjaan Umum**			
	3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	69.00	91,75
	3.2 Rasio Jaringan Irigasi	%	16.62	21.61

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	5.00	5,20
	3.4 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2.40	2.65
	3.5 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	57.54	87.54
4	**Perumahan**			
	4.1 Rumah tangga pengguna air bersih	%	78.91	84.07
	4.2 Rumah tangga pengguna listrik	%	93.85	95.05
	4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi	%	41.20	46.95
5	**Perencanaan Pembangunan**			
	5.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
	5.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada
	5.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada
	5.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada
6	**Perhubungan**			
	6.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang/tahun	40342	50342
	6.2 Rasio ijin trayek	izin/armada	1.37	1.51
	6.3 Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1700	3465
	6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	4	9
	6.5 Angkutan darat	%	1.58	4.08
	6.6 Kepemilikan KIR angkutan umum	%	5.8	12.46
7	**Lingkungan Hidup**			
	7.1 Persentase penanganan sampah	%	78.66	80.19
	7.2 Persentase Penduduk berakses air minum	%	78.9	93.04
	7.3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2.42	2.97
8	**Kependudukan dan Catatan Sipil**			
	8.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	1.17	1.1
	8.2 Kepemilikan KTP	%	83.7	98.78
9	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**			
	9.1 Rasio akseptor KB	%	17.81	17.86
	9.2 Cakupan peserta KB aktif	%	77.87	78.47
	9.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	39.05	23.27
10	**Ketenagakerjaan**			
	10.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	66.10	71.35
	10.2 Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7.13	3
11	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**			
	11.1 Populasi Koperasi	Unit	202	240
	11.2 Persentase koperasi aktif	Persen	30.69	46.66
	11.3 Jumlah Anggota Koperasi	Orang	6,282	**9,282**
	11.4 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UNIT	1,044	**3,544**
12	**Kepemudaan dan Olahraga**			
	12.1 Kepemudaan dan Olahraga	Orang	39,860	42,340
	12.2 Jumlah organisasi pemuda	Buah	7	12
	12.3 Jumlah organisasi olahraga	Buah	197	207
	12.4 Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	10	16
	12.5 Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	8	13
	12.6 Lapangan olahraga	%	0.27	0.52
13	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**			
	13.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0.43	0.93
	13.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	58.44	64.44
	13.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	0.36	0.46
	13.4 Pertumbuhan ekonomi	%	4.56	7,0-7,5
	13.5 Kemiskinan	%	20.49	8.99
	13.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada
	13.7 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0.58	0.64
	13.8 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Tidak	Ada
14	**Ketahanan Pangan**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
	15.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	1	2
	15.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Unit	1	2
	15.3 Jumlah LSM	Buah	50	60
	15.4 LPM Berprestasi	%	9.00	11.00
	15.5 PKK aktif	%	67.56	81.96
	15.6 Posyandu aktif	%	80	95.65
16	**Statistik**			
	16.1 Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	
	16.2 Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	
17	**Kearsipan**			
	17.1 Pengelolaan arsip secara baku			
	17.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	74	94
18	**Komunikasi dan Informatika**	Kgt	3	5
	18.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	6	15
	18.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Media	1	2
	18.3 Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada
	18.4 Pameran/expo	Kali	1	4
19	**Perpustakaan**			
	19.1 Jumlah perpustakaan	Unit	3	7
	19.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	115	1500
	19.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1	1
B	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**			
1	**Pertanian**			
	1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun			
	1.1.1 Padi	Ton	190,440	240,440
	1.1.2 Jagung	Ton	1,853	2,853
	1.1.3 Kedele	Ton	3,299	4,299
	1.2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar			
	1.2.1 Padi	Ku/Ha	542,127	592,127
	1.2.2 Jagung	Ku/Ha	20,385	21,885
	1.2.3 Kedele	Ku/Ha	102.51	117.51
	1.3 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	59.83	18.42
	1.4 Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	persen	17.42	18.42
	1.5 Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	persen	26.83	27.83
	1.6 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB			
	1.7 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	persen	8.21	9.21
2	**Kehutanan**			
	2.1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	persen	4.67	5.17
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**			
	3.1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.13	3.13
4	**Kelautan dan Perikanan**			
	4.1 Produksi perikanan	Ton	73.01	95.00
	4.2 Konsumsi ikan	Kg / Kap/Thn	55.56	90.00
	4.3 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	persen	2.49	2.54
	4.4 Cakupan bina kelompok nelayan	Kelp	71.43	70.59
	4.5 Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	81.57	80.91
5	**Perdagangan**			
	5.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Milyar	6.15	7.23
6	**Perindustrian**			
	6.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	1.84	1.94
	6.2 Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan	%	1.56	1.61
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
A	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	34.77	35.24
B	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**			
1	**Perhubungan**			
	1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	0.84	1.84
	1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/tahun	1.9	12.69
	1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang/tahun	7.85	14.79
2	**Lingkungan Hidup**			
	4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	78.91	84.07
3	**Komunikas dan Informatika**			
	5.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	93.87	98.87
C	**Fokus Iklim Berinvestasi**			
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**			
	1.1 Angka kriminalitas	%	12.62	7.62
	1.2 Lama proses perijinan	hari	13.8	3.8
	1.3 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Buah	20	26
D	**Fokus Sumber Daya Manusia**			
1	**Ketenagakerjaan**			
	1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3	%	2.8	6.1
	1.2 Rasio ketergantungan	%	34.38	20.35

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR :..... TAHUN 2016
TANGGAL 28 JANUARI 2016 M
...28.. RABIUL AHKIR 1437 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2012 s/d 2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
A	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	1.1 Pertumbuhan PDRB	%	4.56	5,0-5,5	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,0-7,5	7,0-7,5
	1.2 Laju inflasi Kab. Nagan Raya	%	3,43	5	4.8	4.6	4.4	4.2	4.2
	1.3 PDRB per kapita	Juta	7.08	7.19	7.3	7.42	7.53	7.65	7.65
	1.4 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	79.51	80.71	82.21	83.71	85.21	86.71	86.71
	1.5 Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	184	185	186	187	188	189	190
B	**Fokus Kesejahteraan Sosial**								
1.	**Pendidikan**								
	1.1. Angka melek huruf	%	93.00	93.7	94.02	94.83	95.24	95.00	95.00
	1.2. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.9	9.7	10.4	11.1	11.8	12	12
	1.3. Angka partisipasi kasar								
	SD/MI/Paket A	%	124.08	128.00	130.53	135.21	140.02	145.13	145.13
	SMP/MTS/Paket B	%	96.94	97.04	97.98	98.79	98.85	99.25	99.25
	SM/MA/Paket C	%	86.16	86.94	87.78	89.57	90.69	92.67	92.67
	1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan								
	SD Sederajat	%	31.75	32.75	33.75	34.75	35.75	36.75	36.75
	SLTP Sederajat	%	23.95	23.96	23.97	23.98	23.99	24.00	24.00
	SLTA Sederajat	%	18.53	19.53	20.53	21.53	22.53	23.53	24.52
	Diploma I/II/III	%	5.15	5.55	5.85	6.15	6.45	6.75	6.75
	Diploma IV/SI	%	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.30
	S2/S3	%	0.2	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.2
	SLTP+	%	52.63	54.34	55.95	57.56	59.17	60.78	61.77
	1.5 Angka partisipasi murni								
	1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89.07	89.86	90.65	91.44	92.23	93.02	93.02
	1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70.07	72.13	73.32	73.89	74.67	75.92	75.92
	1.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	%	62.03	66.60	67.60	68.60	69.60	70.60	70.6
2.	**Kesehatan**								
	2.1 **Angka usia harapan hidup**	Tahun	69.87	69.93	70.04	70.97	71.18	71.96	71.96
	2.2 **Persentase balita gizi buruk**	%	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
3.	**Pertanahan**								
	3.1 Persentase penduduk yang memiliki lahan								
4.	**Ketenagakerjaan**								
	4.1 Rasio penduduk yang bekerja	%	0.986	0.987	0.988	0.989	0.990	0.991	0.991
C	**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**								
1	**Kebudayaan**								
	1.1 Jumlah gedung	Unit	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
2	**Pemuda dan Olahraga**								
	2.1 Jumlah klub olahraga	Klub	14	14	14	14	14	14	14

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
A	**Fokus Pelayanan Urusan Wajib**								
1.	**Pendidikan**								
	1.1. Pendidikan dasar								
	1.1.1. Angka partisipasi sekolah	%	88.28	89.28	90.28	91.28	92.28	93.28	93.28
	1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	77.51	78.02	78.53	79.04	79.55	80.06	80.06
	1.1.3. Rasio guru terhadap murid	%	102.3	108.16	114.35	120.9	127.82	135.14	135.14
	1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	1.7	1.83	1.96	2.09	2.22	2.35	2.35
	1.2 Pendidikan menengah								
	1.2.1 Angka partisipasi sekolah	%	86.15	88.78	91.49	94.28	97.16	100.01	100.01
	1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	3.28	3.56	3.84	4.12	4.40	4.68	4.68
	1.2.3 Rasio guru terhadap murid	%	842.18	872.20	892.40	904.12	923.78	956.81	956.81
	1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	%	3.77	3.9	4.03	4.16	4.29	4.42	4.42
	1.3 Fasilitas Pendidikan								
	1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	654	704	754	804	854	904	904
	1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	407	427	447	467	487	507	507
	1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
	1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	12.98	20.98	30.98	40.98	50.98	60.98	
	1.5 Angka Putus Sekolah								
	1.5.1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	2	2	2	2	2	2	2
	1.5.2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0
	1.5.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	15	13	12	10	8	6	6
	1.6 Angka Kelulusan								
	1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.45	99.5	99.55	99.6	99.65	99.7	99.7
	1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.35	99.4	99.45	99.5	99.55	99.6	99.6
	1.6.3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.48	99.53	99.58	99.63	99.68	99.73	99.73
	1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99.53	99.58	99.63	99.68	99.73	99.78	99.78
	1.6.5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100
	1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	58.30	60.30	62.30	64.30	66.30	68.30	68.30
2.	**Kesehatan**								
	2.1 Rasio posyandu per satuan balita	/ 1000 balita	13.51	14.6	15.72	16.83	17.84	18.85	18.85
	2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/100.000	0.75	0.89	1.03	1.17	1.31	1.45	1.45
	2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/100.000	6.85	7.10	7.35	7.60	7.85	8.10	8.10
	2.4 Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000	0.34	0.68	1.02	1.36	1.7	2.04	2.04
	2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/100.000	3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	8.01
	2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	30	45	60	75	78	80	80
	2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82.30	85.30	88.30	91.30	94.30	100.00	100.00
	2.8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	49	55	70	85	90	95	95
	2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.11 Cakupan puskesmas	unit	1.3	1.7	2.1	2.5	2.9	3.4	3.4
	2.12 Cakupan pembantu puskesmas	unit	0.19	0.89	1.59	2.29	2.99	3.69	3.69
	2.13 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	80	85	90	93	95	95	95
	2.14 Cakupan Kunjugan Ibu Hamil dengan komplikasi Bidan yang ditangani	%	30	45	60	75	78	80	80
	2.15 Cakupan Pelayanan Nifas	%	89	90	90	90	90	90	90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	2.16 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	13	60	68	75	80	80	80
	2.17 Cakupan Kunjungan Bayi	%	72	85	88	89	90	90	90
	2.18 Cakupan Pelayanan Balita	%	54	60	75	85	87	90	90
	2.19 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6-24 bulan KLG Miskin	%	50	60	75	85	90	95	95
	2.20 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	15	30	50	75	85	95	95
	2.21 Cakupan Peserta KB Aktif	%	33	45	50	60	65	70	70
	2.22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.23 cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.24 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.25 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.26 Cakupan Desa Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
	2.27 Cakupan Desa Siaga Aktif	%	35	40	50	60	70	75	75
3	**Pekerjaan Umum**								
	3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	69.00	65.75	72.25	78.75	85.25	91.75	91.75
	3.2 Rasio Jaringan Irigasi	%	16.62	17.62	18.62	19.62	20.62	21.62	21.61
	3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	5.00	5.04	5.08	5.12	5.16	5.20	5.20
	3.4 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2.40	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.65
	3.5 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	57.54	63.54	69.54	75.54	81.54	87.54	87.54
4	**Perumahan**								
	4.1 Rumah tangga pengguna air bersih	%	78.91	79.95	80.98	82.01	83.04	84.07	84.07
	4.2 Rumah tangga pengguna listrik	%	93.85	94.20	94.45	94.65	94.85	95.05	95.05
	4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi	%	41.20	42.35	43.50	44.65	45.80	46.95	46.95
5	**Perencanaan Pembangunan**								
	5.1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	**Perhubungan**								
	6.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang/tahun	40342	42342	44342	46342	48342	50342	50342
	6.2 Rasio ijin trayek	izin/armada	1.37	1.39	1.42	1.45	1.48	1.51	1.51
	6.3 Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1700	2835	2955	3065	3185	3465	3465
	6.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	4	5	6	7	8	9	9
	6.5 Angkutan darat	%	1.58	2.08	2.58	3.08	3.58	4.08	4.08
	6.6 Kepemilikan KIR angkutan umum	%	5.8	29.1	25.04	20.55	16.79	12.46	12.46
7	**Lingkungan Hidup**								
	7.1 Persentase penanganan sampah	%	78.66	78.95	79.26	79.57	79.88	80.19	80.19
	7.2 Persentase Penduduk berakses air minum	%	78.9	81.92	83.95	86.98	90.01	93.04	93.04
	7.3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2.42	2.53	2.64	2.75	2.86	2.97	2.97
8	**Kependudukan dan Catatan Sipil**								
	8.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	1.17	1.14	1.11	1.7	1.4	1.1	1.1

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	8.2 Kepemilikan KTP	%	83.7	85.78	88.78	91.78	94.79	98.78	98.78
9	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**								
	9.1 Rasio akseptor KB	%	17.81	17.82	17.83	17.84	17.85	17.86	17.86
	9.2 Cakupan peserta KB aktif	%	77.87	77.99	78.11	78.23	78.35	78.47	78.47
	9.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	39.05	35.07	31.49	28.28	25.41	23.27	23.27
10	**Ketenagakerjaan**								
	10.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	66.10	67.15	68.20	69.25	70.30	71.35	71.35
	10.2 Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7.13	6	5	4	3	3	3
11	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**								
	11.1 Populasi Koperasi	Unit	202	210	218	226	232	240	240
	11.2 Persentase koperasi aktif	Persen	30.69	34.28	37.61	40.70	43.96	46.66	46.66
	11.3 Jumlah Anggota Koperasi	Orang	6,282	6,882.00	7,482.00	8,082.00	8,682.00	9,282.00	**9,282**
	11.4 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UNIT	1,044	1,544	2,044	2,544	3,044	3,544	**3,544**
12	**Kepemudaan dan Olahraga**								
	12.1 Kepemudaan dan Olahraga	Orang	39,860	40,340	40,840	41,360	41,860	42,340	42,340
	12.2 Jumlah organisasi pemuda	Buah	7	8	9	10	11	12	12
	12.3 Jumlah organisasi olahraga	Buah	197	199	201	203	205	207	207
	12.4 Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	10	12	13	14	15	16	16
	12.5 Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	8	9	10	11	12	13	13
	12.6 Lapangan olahraga	%	0.27	0.32	0.37	0.42	0.47	0.52	0.52
13	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	13.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	0.43	0.53	0.63	0.73	0.83	0.93	0.93
	13.2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	58.44	56.44	58.44	60.44	62.44	64.44	64.44
	13.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	0.36	0.38	0.4	0.42	0.44	0.46	0.46
	13.4 Pertumbuhan ekonomi	%	4.56	5,0-5,5	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,0-7,5	7,0-7,5
	13.5 Kemiskinan	%	20.49	19.29	17.79	16.29	14.79	13.29	8.99
	13.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	13.7 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0.58	0.56	0.58	0.6	0.62	0.64	0.64
	13.8 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	**Ketahanan Pangan**								
	14.1 Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
	15.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	1	1	1	1.2	1.4	2	2
	15.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Unit	1	1	1	1.2	1.4	2	2
	15.3 Jumlah LSM	Buah	50	52	54	56	58	60	60
	15.4 LPM Berprestasi	%	9.00	9.40	9.80	10.20	10.60	11.00	11.00
	15.5 PKK aktif	%	67.56	70.46	73.36	76.26	79.06	81.96	81.96
	15.6 Posyandu aktif	%	80	83.75	86.9	89.25	92.45	95.65	95.65
16	**Statistik**								
	16.1 Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	16.2 Buku "PDRB kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
17	**Kearsipan**								
	17.1 Pengelolaan arsip secara baku	%	74	78	82	86	90	94	94
	17.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kgt	3	4	4	4	5	5	5
18	**Komunikasi dan Informatika**	Media	6	8	10	12	14	15	15
	18.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	1	1	1	2	2	2	2
	18.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	18.3 Web site milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	18.4 Pameran/expo	Kali	1	2	3	3	4	4	4
19	**Perpustakaan**								
	19.1 Jumlah perpustakaan	Unit	3	4	4	5	6	7	7
	19.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	115	125	250	400	800	1500	1500
	19.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1	1	1	1	1	1	1
B	**Fokus Layanan Urusan Pilihan**								
1	**Pertanian**								
	1.1 Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun								
	1.1.1 Padi	Ton	190,440	200,440	210,440	220,440	230,440	240,440	240,440
	1.1.2 Jagung	Ton	1,853	2,053	2,253	2,453	2,653	2,853	2,853
	1.1.3 Kedele	Ton	3,299	3,499	3,699	3,899	4,099	4,299	4,299
	1.2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar								
	1.2.1 Padi	Ku/Ha	542,127	552,127	562,127	572,127	582,127	592,127	592,127
	1.2.2 Jagung	Ku/Ha	20,385	20,685	20,985	21,285	21,585	21,885	21,885
	1.2.3 Kedele	Ku/Ha	102.51	105.51	108.51	111.51	114.51	117.51	117.51
	1.3 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	59.83	60.83	61.33	61.83	62.33	62.83	18.42
	1.4 Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	persen	17.42	17.62	17.82	18.02	18.22	18.42	18.42
	1.5 Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	persen	26.83	27.03	27.23	27.43	27.63	27.83	27.83
	1.6 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB								
	1.7 Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	persen	8.21	8.41	8.61	8.81	9.01	9.21	9.21
2	**Kehutanan**								
	2.1 Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)	persen	4.67	4.77	4.87	4.97	5.07	5.17	5.17
3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
	3.1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	2.13	2.33	2.53	2.73	2.93	3.13	3.13
4	**Kelautan dan Perikanan**								
	4.1 Produksi perikanan	Ton	73.01	77.05	81.75	86.15	90.35	95.00	95.00
	4.2 Konsumsi ikan	Kg / Kap/Thn	55.56	63.15	70.75	78.35	84.05	90.00	90.00
	4.3 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	persen	2.49	2.5	2.51	2.52	2.53	2.54	2.54
	4.4 Cakupan bina kelompok nelayan	Kelp	71.43	73.33	73.33	68.75	75.00	70.59	70.59
	4.5 Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	81.57	80.71	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
5	**Perdagangan**								
	6.1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Milyar	6.15	6.35	6.55	6.77	7.00	7.23	7.23
6	**Perindustrian**								
	7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	1.84	1.86	1.88	1.90	1.92	1.94	1.94
	7.3 Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan	%	1.56	1.57	1.58	1.59	1.6	1.61	1.61
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
A	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	%	6,066,360	6,084,360	6,102,360	6,120,360	6,138,360	6,156,360	6,156,360
	1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	34.77	34.87	34.96	35.05	35.15	35.24	35.24
B	**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**								
1	**Perhubungan**								
	1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	0.84	1.04	1.24	1.44	1.64	1.84	1.84
	1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/tahun	1.9	12.97	11.85	11.97	12.13	12.69	12.69

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012-2017	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	orang/tahun	7.85	16.03	14.18	14.42	14.53	14.79	14.79
2	**Lingkungan Hidup**								
	4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	78.91	79.95	80.98	82.01	83.04	84.07	84.07
3	**Komunikas dan Informatika**								
	5.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	93.87	94.87	95.87	96.87	97.87	98.87	98.87
C	**Fokus Iklim Berinvestasi**								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	1.1 Angka kriminalitas	%	12.62	11.62	10.62	9.62	8.62	7.62	7.62
	1.2 Lama proses perijinan	hari	13.8	11.8	9.8	7.8	5.8	3.8	3.8
	1.3 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Buah	20	20	22	24	25	26	26
D	**Fokus Sumber Daya Manusia**								
1	**Ketenagakerjaan**								
	1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3	%	2.8	2.9	3.1	4.1	5.1	6.1	6.1
	1.2 Rasio ketergantungan	%	34.38	31.23	28.80	25.65	22.50	20.35	20.35

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI